UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Strategi Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi bagi Kelompok Masyarakat dengan Hambatan Ekonomi dan Geografis untuk Mencapai Indonesia Emas 2045
Andini Lusya Jasman, Puguh Prasetya Utomo, S.I.P., M.P.A., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GRAFIK iv
RINGKASAN EKSEKUTIF v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan 5
1.3. Sasaran Kelompok Kepentingan 5
1.4 Struktur Naskah Kebijakan 6
BAB II RUANG LINGKUP DAN PERNYATAAN MASALAH 7
2.1 Struktur Permasalahan dan Rumusan Masalah Kebijakan 7
2.1.1 Biaya Pendidikan Tinggi masih Melampaui Kapasitas Ekonomi Masyarakat 8
2.1.2 Ketimpangan Infrastruktur dan Hambatan Geografis dalam Akses Pendidikan Tinggi 10
2.1.3 Ketimpangan Kualitas Pendidikan Menengah dan Hambatan Sosial untuk Melanjutkan ke Pendidikan Tinggi 13
2.1.4 Keterbatasan Dukungan terhadap Optimalisasi Perguruan Tinggi Swasta dalam Perluasan Akses Pendidikan Tinggi 15
2.2 Kerangka Regulasi 16
2.3 Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Upaya Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi 17
2.3.1 Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) 17
2.3.2 Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) 19
2.4 Evaluasi Kebijakan 21
2.4.1 Efektivitas *(Effectiveness)* 21
2.4.2 Efisiensi *(Efficiency)* 24
2.4.3 Pemerataan *(Equity)* 26
2.4.4 Responsivitas *(Responsiveness)* 28
2.4.5 Ketepatan *(Appropriateness)* 30
2.5 Analisis Hierarki Masalah Kebijakan 32
BAB III KOMPARASI KEBIJAKAN INTERNASIONAL 37
3.1. Komparasi Internasional 37
3.1.1 Filipina 38

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Strategi Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi bagi Kelompok Masyarakat dengan Hambatan Ekonomi dan Geografis untuk Mencapai Indonesia Emas 2045
Andini Lusya Jasman, Puguh Prasetya Utomo, S.I.P., M.P.A., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

3.1.2 Brazil 44
3.2 Refleksi dan Pembelajaran Kebijakan 51
BAB IV REKOMENDASI KEBIJAKAN 54
4.1 Tujuan dan Sasaran 54
4.2 Alternatif Kebijakan 56
4.2.1 Peningkatan Cakupan Bantuan Biaya Hidup KIP Kuliah dan ADik 57
4.2.2 Penyesuaian Alokasi Kuota KIP Kuliah bagi Perguruan Tinggi Swasta 60
4.3 Analisis Perbandingan Alternatif Kebijakan 63
4.3.1 Fisibilitas Teknis *(Technical Feasibility)* 63
4.3.2 Kemungkinan Ekonomi dan Finansial *(Economic dan Financial Possibility)* 66
4.3.3 Kelayakan Politik *(Political Viability)* 69
4.3.4 Operabilitas Administratif *(Administrative Operability)* 72
4.4 Deskripsi Alternatif yang Dipilih 75
4.5 Pemetaan Pemangku Kepentingan 78
4.6 Strategi Implementasi 80
4.7 Rencana *Monitoring* dan Evaluasi 83
4.8 Keterbatasan Analisis dan Potensi *Unintended Effects* 84
DAFTAR PUSTAKA 86